

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PALANGKA KOTA PALANGKA RAYA

Community Participation in Development Planning Deliberations in Palangka Village, Palangka Raya City

Masrukin*
Anwar

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia

email:

masrukin@umpalangkaraya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan mendeskripsikan tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Palangka Kota Palangka Raya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Palangka Kota Palangka Raya dipilih sebagai lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Sistem pembangunan di kelurahan palangka adalah suatu proses politik untuk memperoleh kesempatan bersama melalui aktivitas yang didalamnya terdapat negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan. System pembangunan yang ada di kelurahan Palangka ini dilakukan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dan mengetahui setiap proses pembangunan serta setiap tahap perkembangannya. Dalam hal ini lebih sebagai sebuah alat pengambil keputusan yang diharapkan dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan

Keywords:

Community Participation
discussion
Planning
Development

Accepted

January 2017

Published

April 2017

Abstract

This study aims to find out, explain and describe community participation in development planning meetings in Palangka Kelurahan, Palangka Raya City.

This study uses qualitative research methods, the research conducted is a descriptive study where community participation in development planning in Palangka Kelurahan Palangka Raya City was chosen as the location of the study. Techniques for collecting data by observation, interviews, and documentation.

Based on the results of the study it can be concluded that the development system in the Palangka Village is a political process to obtain joint opportunities through activities in which there are negotiations between all development actors. The development system in the Palangka village is carried out transparently so that the community has the convenience and knowledge of each development process and every stage of its development. In this case, it is more a tool for decision makers who are expected to be able to find out what the community needs.

PENDAHULUAN

Musrenbang desa/kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa/kelurahan dilakukan setiap bulan januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu/ memperhatikan kepada rencana

pembangunan jangka menengah desa (RPJM) yang sudah disusun.

Karangka Hukum Musrenbang Desa/Kelurahan berdasarkan Undang-undang NO2 tahun 2015 tentang pemerintah daerah merupakan karangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunandari bawah secara partisipasif. Peraturan pemerintah NO.72/2005 tentang desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi

desa dalam konteks otonomi daerah dengan mengacu pada UU NO 2/2015 tersebut. Sedangkan kelurahan dijabarkan dalam peraturan pemerintah no.73/2005 tentang kelurahan.

Paradigma pembangunan di Indonesia pada awalnya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah secara keseluruhan, dalam arti kata, pemerintahlah yang berstatus sebagai pusat seluruh aktivitas pembangunan, baik dari segi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan. Setelah aktivitas pembangunan dengan paradigma tersebut belum dapat membuahkan hasil yang optimal, salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah besarnya dana pembangunan yang harus disiapkan oleh pemerintah, akibatnya paradigma tersebut mengalami perubahan, sehingga pembangunan yang dilakukan menjadikan masyarakat sebagai pelaksana terdepan pembangunan bangsa dan negara. Karena disadari oleh pemerintah bahwa hanya dengan menjadikan masyarakat sebagai obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan yang memungkinkan tercapainya pembangunan

secara optimal. Atas dasar pertimbangan itulah sehingga partisipasi masyarakat dan Swasta dalam pembangunan senantiasa diupayakan untuk ditumbuhkan dan dikembangkan mulai dari masyarakat kelurahan sampai pada masyarakat kota.

Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten, bahkan mekanismenya sering disebut otomatis. Sementara itu, Menurut Ghazali (2008:28) suatu system yang dibuat tentunya memiliki maksud tertentu, system yang di buat untuk mencapai suatu tujuan (goal) dan sasaran (objective). Tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran biasanya dalam ruang lingkup yang lebih sempit.

Syarat-syarat yang harus dimiliki system menurut Ghazali (2008:28) sebagai berikut :

1. System harus di bentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan.

2. Elemen Sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan.
3. Adanya hubungan di antara elemen Sistem.
4. Unsur dasar dari Sistem (arus, informasi, energi, dan material)
5. Lebih penting dari pada elemen Sistem.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (Suryono, 2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat.

Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Achmadi (2004:44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

System pembangunan di kelurahan palangka dilakukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan

tahunan yang berupa daftar prioritas yang disampaikan dalam system yang lebih baik.

Berkaitan dengan yang peneliti temukan di lapangan banyak masyarakat yang mengeluhkan saat musrembang tidak diikuti. Pir setiap RT mengajukan lebih dari satu pembangunan, banyak pengajuan masyarakat yang belum terkalisakan dalam kontek pembangunan. Partisipasi masyarakat disebagian RT yang ada di kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya merasa kecewa karena pengajuan mereka banyak yang tidak di Acc dari pemerintah, masyarakat setempat menurut temuan yang saya dapat di lapangan mengeluhkan lembaganya waktu pembangunan yang ada di Kelurahan Palangka ini.

Masyarakat menyalahkan pihak kelurahan tidak mendengar aprisiasi dari masyarakat, padahal saya tau pihak kelurahan hanya menampung saja aspirasi masyarakat dengan cara dilakukannya musrembang. Semua masyarakat ikut diikutsertakan dalam musrembang yang bagaimana setiap masyarakat diwakili oleh setiap ketua RT/ ataupun RW masing-masing.

Dalam artian, masyarakat mengeluhkan kinerja pemerintah dalam pembangunan, tetapi disisi lain peneliti melihat langsung pemerintah kota kitabekerja sangat optimal semua pengajuan masyarakat sudah dikerjakan, walaupun masih ada saja yang belum terkalisakan. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembangunan di Kelurahan Palangka adalah dari segi dana.

KESIMPULAN

Sistem pembangunan di Kelurahan Palangka adalah suatu proses politik untuk memperoleh kesempatan bersama melalui aktivitas yang didalamnya terdapat negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan. Sistem pembangunan yang ada di Kelurahan Palangka ini dilakukan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dan mengetahui setiap proses pembangunan serta setiap tahap perkembangannya.

Dalam hal ini lebih sebagai sebuah alat pengambil keputusan yang diharapkan dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Palangka yang kategorinya sedang, maka perlu adanya upaya upayaoleh pemerintah untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Sebagai salah satu contoh yang perlu ditempuh adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih cara bagaimana mereka mau berpartisipasi dalam pembangunan. Disamping itu pemerintah desa harus mampu menjalankan kepemimpinan sesuai karakter masyarakatnya, dengan demikian akan terjalin adanya komunikasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan ini disarankan kepada pemerintah Kelurahan Palangka agar senantiasa memperbaiki dan mengejar pendidikan dalam segala modelnya. Disamping itu perlu pula diadakan pembinaan terhadap masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani sehingga mereka dapat hidup lebih layak lagi seperti kehidupan masyarakat pada umumnya.

REFERENSI

- Bintoro, tjokramidjojo. 2006. *Perencanaan daerah partisipatif, pondok edukasi, Pengantar analisis Kebijakan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta
- David, Earton dan S.P Varma. 2009. *Perencanaa Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Ghazali, Muhammad. 2008. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama.
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050-187/kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman

Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Kunarjo. 2002. *Perencana dan Pengendalian program Pembangunan*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, UI Press.

Lembaga Administrasi Negara (2000, 6) dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 j.o Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Mohtar,M. 2002. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga

Sastropetro. 2008. *Partisipasi secara efektif*. Jakarta : CV Cita Utama.

Suryono. 2001. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : CV Cita Utama.

Todaro. 2000. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Sistem Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 109